



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

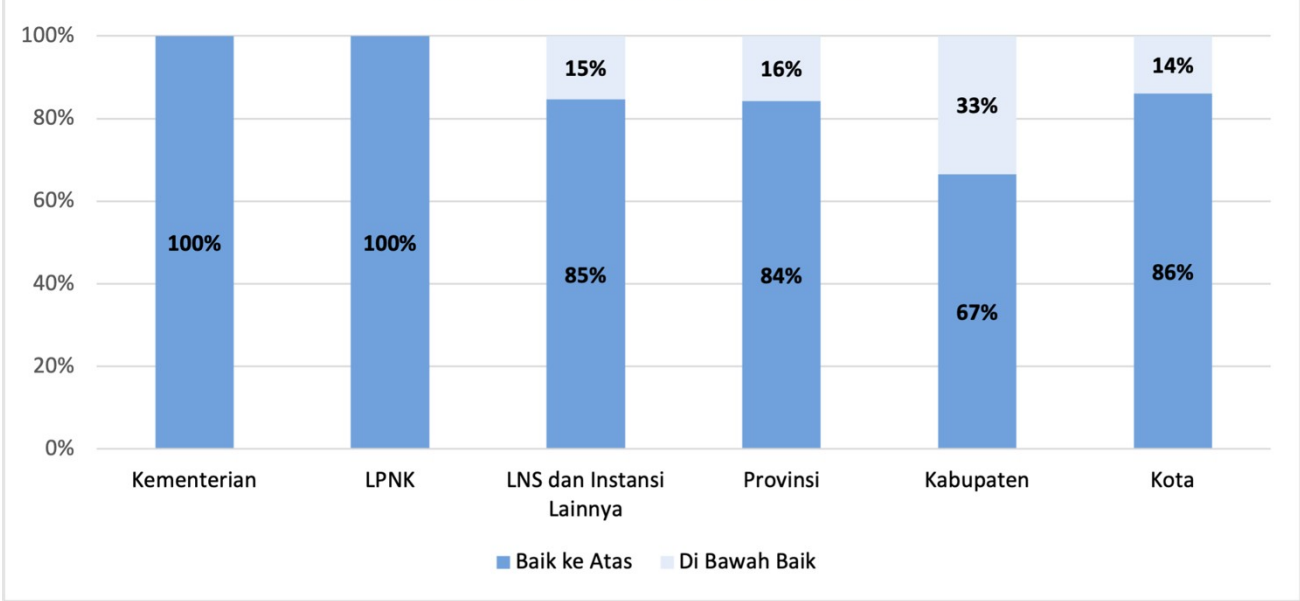


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

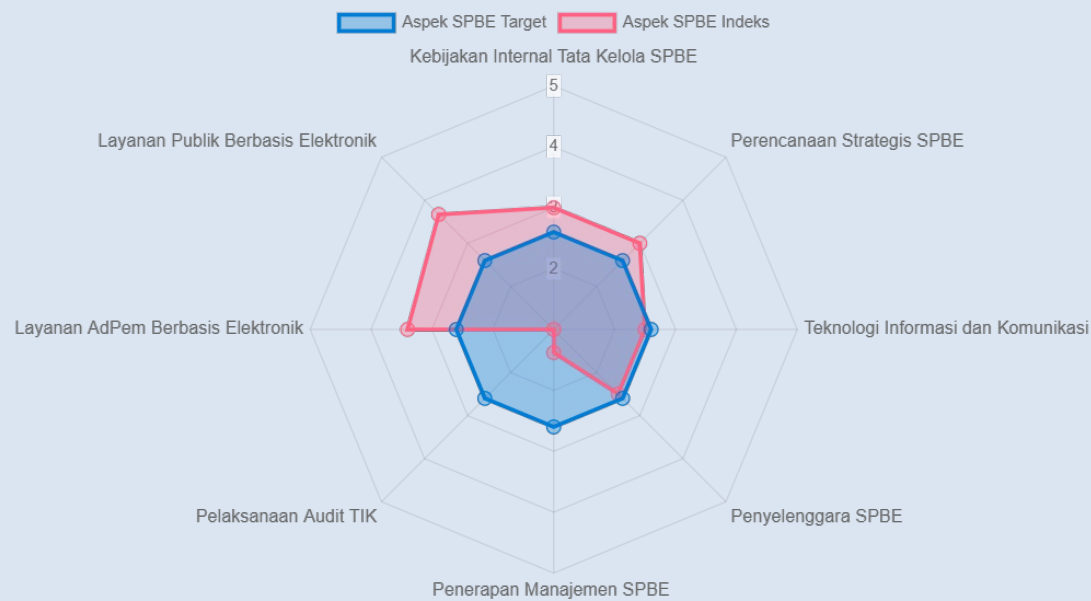
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,87
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,38
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,51
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Kebijakan Internal, terkait: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah, Kebijakan Internal Manajemen Data SPBE Instansi Pemerintah, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pemerintah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria terkait kekuatan, belum ada upaya untuk membuat kebijakan internal SPBE yang dapat mengakomodir dilakukan kolaborasi dan integrasi serta peningkatan berkelanjutan.
- **Kelemahan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara tidak ada kelemahan, rata-rata sudah memenuhi kriteria yang diminta SPBE terkait kebijakan internal SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Tata Kelola Dalam Strategi dan Perencanaan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Tata Kelola, terkait: Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah, Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah, dan Rencana dan Anggaran SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Strategi dan Perencanaan ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara sudah memenuhi kriteria indikator terkait: Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah.
- **Kelemahan**
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Strategi dan Perencanaan ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Inovasi Proses Bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Tata Kelola Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Tata Kelola, terkait: Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria terkait kekuatan, belum ada upaya standarisasi tata kelola SPBE yang dapat mengakomodir untuk integrasi, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.
- **Kelemahan**
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Layanan Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Tata Kelola Dalam Penyelenggara SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Tata Kelola, terkait: Kolaborasi Penerapan SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria terkait kekuatan, belum ada upaya standarisasi

tata kelola SPBE yang dapat mengakomodir untuk integrasi, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.

- Kelemahan
Pada Aspek Tata Kelola Dalam Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Penerapan Manajemen SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah tidak tersedianya pedoman yang mendukung kegiatan Manajemen SPBE sama sekali. Untuk itu pembuatan Pedoman Manajemen SPBE diperlukan segera dalam mendukung segala kegiatan SPBE kedepannya. Selain itu, keselarasan dengan Peta Rencana SPBE diperlukan juga untuk melihat kesinambungan segala kegiatan SPBE nantinya.

- Kekuatan
Pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Penerapan Manajemen ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria terkait kekuatan, belum ada upaya manajemen SPBE terpadu yang dapat mengakomodir untuk manajemen terintegrasi, revaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.
- Kelemahan
Pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Penerapan Manajemen ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Audit TIK yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah tidak tersedianya pedoman yang mendukung kegiatan Manajemen SPBE sama sekali. Untuk itu pembuatan Pedoman Manajemen SPBE diperlukan segera dalam mendukung segala kegiatan SPBE kedepannya. Selain itu, keselarasan dengan Peta Rencana SPBE diperlukan juga untuk melihat kesinambungan segala kegiatan SPBE nantinya.

- Kekuatan
Pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Audit TIK ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria terkait kekuatan, belum ada upaya manajemen SPBE terpadu yang dapat mengakomodir untuk manajemen terintegrasi, revaluasi, serta perbaikan berkelanjutan.
- Kelemahan
Pada Aspek Manajemen SPBE Dalam Audit TIK ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Dalam Administrasi Pemerintahan yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Layanan, terkait: Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Dalam Administrasi Pemerintahan ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara sudah memenuhi kriteria indikator terkait: Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kepegawaian.
- Kelemahan
Pada Aspek Layanan Dalam Administrasi Pemerintahan ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara belum memenuhi kriteria indikator terkait: Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Dalam Pelayanan Publik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah dengan tersedianya Layanan, terkait: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Dalam Pelayanan Publik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara sudah memenuhi kriteria indikator terkait: Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 1.
- Kelemahan
Pada Aspek Layanan Dalam Pelayanan Publik ini dapat terlihat bahwa Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara tidak ada kelemahan, rata-rata sudah memenuhi kriteria yang diminta SPBE terkait layanan SPBE.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara, sudah dapat memperlihatkan predikat Baik, dimana dari gambaran pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektoral 1

Namun di sisi lain, kelemahan yang terdapat pada Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara adalah Inovasi Proses Bisnis SPBE, Layanan Pusat Data, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, Audit Keamanan SPBE, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah

Melihat kelebihan dan kelemahan di atas, bagi kelemahan di sisi kebijakan internal, akan lebih baik bagi instansi untuk segera menggunakan penerapan layanan manajemen pengetahuan, agar data dukung terkait dengan segala kegiatan SPBE beserta review, evaluasi, dan tindak lanjut suatu kebijakan yang berkelanjutan dapat diinventarisasi dengan baik.

Untuk kelemahan pada domain tata kelola SPBE, instansi perlu membuat suatu inovasi proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi segala prosedur, dengan memberikan gambaran bagaimana bentuk proses bisnis lama (as is) menjadi bentuk proses bisnis yang baru (to be). Selain itu, pemanfaatan layanan pusat data nasional dan sistem penghubung layanan juga perlu segera dilakukan. Kegiatan pengembangan atau pembuatan aplikasi SPBE perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi ke unit yang memiliki fungsi pengelolaan TIK agar segala bentuk kegiatannya dapat terlihat terpadu dan terkontrol dengan baik siklus pengembangannya. Untuk sistem penghubung layanan, instansi juga dapat membuat kerangka perencanaan yang tergambarkan dalam bentuk peta rencana SPBE, layanan mana saja yang sebaiknya diberikan prioritas untuk terkoneksi dengan SPLP kedepannya. Untuk keseluruhan tata kelola, perlu adanya standarisasi tata kelola SPBE yang dapat diukur secara kuantitatif dan dilakukan peningkatan secara berkesinambungan, dengan adanya review dan evaluasi secara periodik. Keseluruhannya, tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi perlu diperkuat dan dilaksanakan sesuai mandat tugas yang diberikan.

Untuk kelemahan pada domain manajemen SPBE, instansi secara menyeluruh perlu membuat pedoman manajemen SPBE terpadu yang dapat mengakomodir manajemen yang terintegrasi, yang dapat dilakukan pengukuran revidu-evaluasi secara kuantitatif, serta perbaikan berkelanjutan. Tentunya seluruh kegiatan manajemen ini dari indikator 21-31 perlu dilakukan penyelarasan terhadap peta rencana SPBE yang sudah dibentuk.

Untuk kelemahan pada domain layanan SPBE, instansi perlu menyediakan layanan SPBE secara elektronik yang telah mengakomodir kebutuhan instansi untuk melakukan transaksi, integrasi, dan peningkatan layanan yang berkesinambungan. Khususnya layanan yang terkait dengan layanan pengelola Barang Milik Daerah dan layanan pengawasan internal.

Melihat dari bobot nilai yang mengangkat indeks keseluruhan evaluasi, instansi terbantu dengan adanya nilai layanan dan kebijakan yang sudah baik. Untuk itu, segera perkuat kembali layanan yang belum terintegrasi agar segera dilakukan integrasi, beserta dilakukan monev dan tindak lanjutnya. Sedangkan untuk kebijakan untuk dapat diberikan bukti dukung yang lebih sesuai, utamanya dalam terlihat revidu dan evaluasi kebijakan yang perlu dilakukan secara periodik dan bentuk keselarasan antara hasil evaluasi kebijakan dengan tindak lanjut yang dibuat.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024